

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan hasil buminya yang berlimpah serta disebut juga sebagai negara Agraris, yaitu negara yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor penopang dalam pembangunan. Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar masyarakat Indonesia dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia masih bermata pencaharian sebagai petani. Pembangunan dalam bidang pertanian dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sektor pertanian adalah sektor dengan potensi sumber daya alamnya yang berlimpah serta beragam, serta sektor ini juga menjadi lumbung bagi ketersediaan bahan makanan serta bahan mentah yang diperlukan oleh Negara. Alasan lain yang menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan adalah karena sektor ini masih mampu memberikan pemasukan yang signifikan bagi perekonomian nasional. Namun munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Tahun 2019 yang lalu menjadi suatu tantangan dan permasalahan baru diseluruh lini kehidupan.

Salah satu dampak yang perlu diantisipasi dari mewabahnya penyebaran Covid-19 di Indonesia adalah menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan Ketahanan Pangan (GKP) yang diperkenalkan oleh Kementerian

Pertanian ditengah ancaman virus corona saat ini harus didukung oleh semua pihak, khususnya oleh para petani dan penyuluh sebagai ujung tombak dan penggerak sektor pertanian. Oleh sebab itu, Menteri Pertanian mendorong petani dan penyuluh melakukan percepatan tanam untuk mendukung GKP (Gerakan Ketahanan Pangan) secara nasional¹. Perwujudan ketahanan pangan juga merupakan salah satu tujuan utama dari poin SDGs nomor dua, yaitu poin “Tanpa Kelaparan (*zero hunger*)”. Tujuan utama dari poin tanpa kelaparan ini adalah mengakhiri kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan, serta memajukan pertanian berkelanjutan.

Regulasi yang mengatur tentang Ketahanan Pangan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini dalam pasal 1 ayat (4) mendefenisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan².

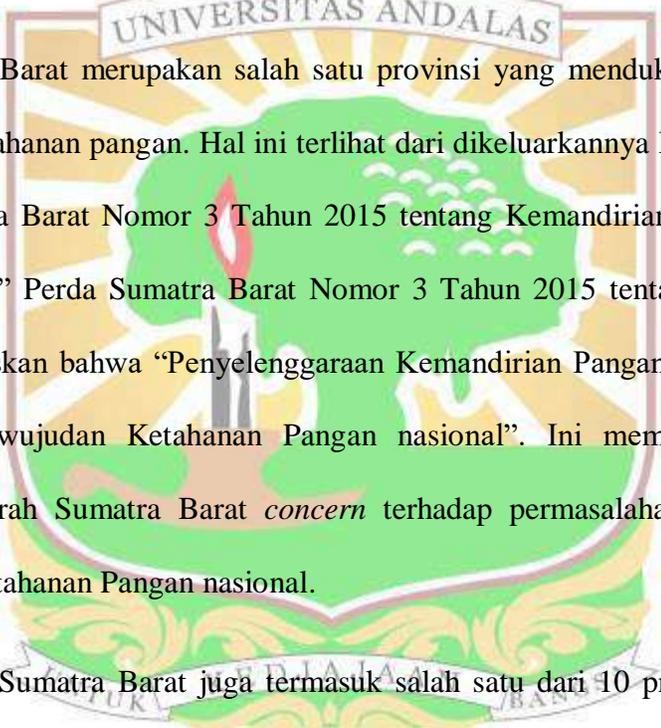
¹ pse.litbang.pertanian.go.id, Gerakan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19, diakses dari <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19/program-kegiatan/367-gerakan-ketahanan-pangan-pada-masa-pandemi-covid-19> pada 25 Oktober 2021, pukul 14:28 WIB

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100> pada 25 Oktober, pukul 10:15 WIB

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ini akhirnya mempunyai landasan hukum yang kuat serta jelas dalam memberikan dukungan bagi keberhasilan perwujudan Ketahanan Pangan di Indonesia. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para *stakeholder* bidang pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan sendiri adalah sebuah sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan ini berguna untuk membantu memastikan bahwa jumlah pangan yang ada, mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan pangan di seluruh negeri baik itu dari segi kualitas, kuantitas, keragaman serta keamanan. Subsistem distribusi bertujuan untuk dapat menciptakan sistem distribusi yang efisien dan efektif serta dapat menjamin ketersediaan akses bagi seluruh rumah tangga untuk memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Terakhir subsistem konsumsi bertujuan untuk dapat membantu mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional dapat memenuhi standar mutu, keragaman, kandungan gizi serta terakhir keamanan dan kehalalannya. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus membahas subsistem ketersediaan pangan terutama beras untuk mewujudkan ketahanan pangan.

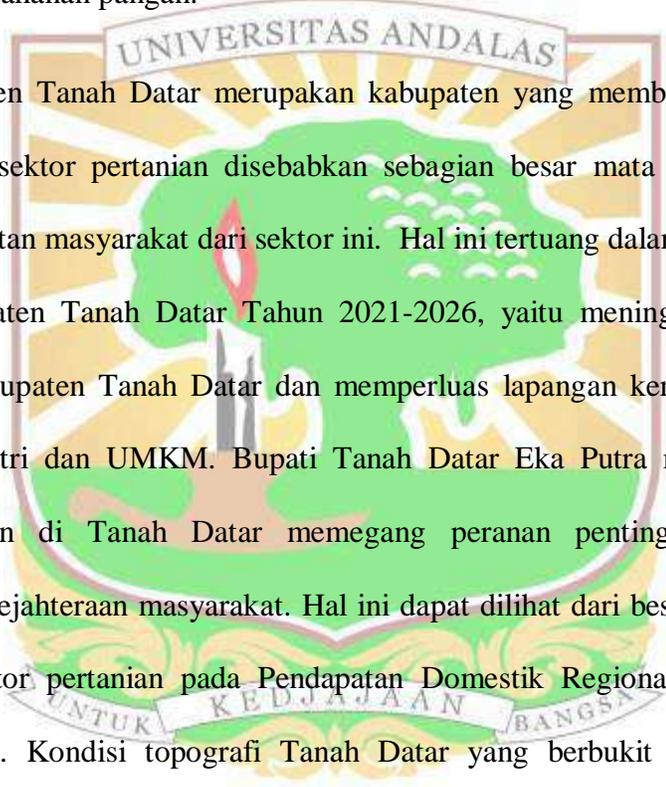
Ketersediaan pangan terutama beras sangatlah penting untuk dijaga mengingat beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama beras ini maka produksi dalam negeri memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu perwujudan gerakan ketahanan pangan merupakan suatu langkah yang tepat untuk menjaga ketersediaan pangan khususnya beras ini, sehingga kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its top, set against a yellow background with radiating lines. Below the tree, there is a stylized figure or symbol. The bottom of the shield is decorated with green and yellow floral patterns. A banner at the very bottom contains the text "PUNYI JERBAKALAH BERKUALITAS".

Sumatra Barat merupakan salah satu provinsi yang mendukung perwujudan dari gerakan ketahanan pangan. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan. Dalam pasal 2 point “a” Perda Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan Kemandirian Pangan bertujuan untuk mendukung perwujudan Ketahanan Pangan nasional”. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Sumatra Barat *concern* terhadap permasalahan pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan nasional.

Provinsi Sumatra Barat juga termasuk salah satu dari 10 provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Mengutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari Januari hingga Mei Tahun 2021 produksi beras di Indonesia mencapai 17,51 juta ton. Jumlah tersebut diakumulasikan dari berbagai wilayah di Indonesia. Provinsi Sumatra Barat, dengan luas lahan 311.671 hektare dapat menghasilkan padi 1.482.996 ton GKG atau

setara dengan 850.794 ton beras³. Ada beberapa kabupaten yang menjadi sentra produksi padi di Sumatra Barat, salah satunya adalah Kabupaten Tanah Datar⁴. Dalam penelitian ini peneliti akan fokus ke Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu kabupaten sentra penghasil padi. Peneliti ingin melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan ketahanan pangan.



Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten yang memberikan dukungan besar terhadap sektor pertanian disebabkan sebagian besar mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat dari sektor ini. Hal ini tertuang dalam misi ke 2 (dua) RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan memperluas lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan “ Sektor pertanian di Tanah Datar memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase sumbangan sektor pertanian pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 29,81%. Kondisi topografi Tanah Datar yang berbukit dan mempunyai gunung serta lahan pertanian yang luasnya 63.630 ha, cocok untuk pengembangan

³ Nurhadi, 2021, 10 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia, Jakarta, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1514500/10-provinsi-penghasil-beras-terbesar-di-indonesia> pada 3 Februari 2022, pukul 22:13 WIB

⁴ BPS Sumatera Barat, 2020, Luas Panen Dan Produksi Padi Provinsi Sumatera Barat 2020, hal 6.

berbagai produk hortikultura, terutama sayuran”⁵. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar menaruh perhatian besar pada sektor pertanian.

Sektor pertanian Kabupaten Tanah Datar dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Untuk mewujudkan ketahanan pangan sendiri Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dibidang pangan memiliki sebuah program yang disebut dengan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu. Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu merupakan salah satu program dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang mampu mewujudkan ketahanan pangan serta menjadi solusi dari permasalahan penurunan luas panen di Kabupaten Tanah Datar. Seperti yang diketahui pada Tahun 2020 yang lalu Kabupaten Tanah Datar tercatat sebagai salah satu dari tiga kabupaten yang mengalami penurunan luas panen terbesar di Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar menjadi kabupaten nomor 2 (dua) terbesar setelah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami penurunan luas panen. Berikut ini data perbandingannya :

Tabel 1. 1 Perbandingan Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (hektare), 2019-2020

No	Nama Kabupaten	Tahun Perbandingan	
		2019	2020
1	Pesisir Selatan	39.205,89	30.047,03
2	Tanah Datar	34.615,67	32.729,08

⁵ Rhian DKincai, 2021, “Eka Putra, Sektor Pertanian Sumbang 29,81% PDRB Tanah Datar”, diakses dari <https://www.portalberitaeditor.com/eka-putra-sektor-pertanian-sumbang-2981-pdrb-tanah-datar/> pada 11 Februari 2022, pukul 15:26 WIB

3	Pasaman	34.261,39	33.192,22
4	Solok	34.116,65	33.518,09
5	Agam	32.622,02	32.764,16
6	Lima Puluh Kota	32.612,23	30.790,65
7	Padang Pariaman	32.362,44	30.830,54
8	Sijunjung	14.795,81	16.080,07
9	Solok Selatan	14.725,29	13.646,53
10	Padang	12.541,95	10.656,64
11	Pasaman Barat	9.309,02	9.755,90
12	Dharmasraya	7.112,57	8.313,09
13	Payakumbuh	4.379,57	4.790,55
14	Pariaman	2.726,48	2.874,08
15	Kota Solok	2.386,48	2.718,52
16	Sawahlunto	1.440,49	1.299,87
17	Kep.Mentawai	829,32	208,12
18	Padang Panjang	822,81	809,38
19	Bukittinggi	805,15	619,95

Sumber : BPS Sumbar Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan luas panen yang cukup besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang dengan masing-masing sebesar 2.500 hektare, 1.886,59 hektare, dan 1.885,31 hektare. Kabupaten Tanah Datar menjadi kabupaten nomor 2 (dua) penyumbang terbesar terhadap penurunan luas panen pada Tahun 2020⁶.

Kemudian pada Tahun 2021 yang lalu merujuk pada data produksi padi Tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan hasil produksi padi Tahun 2021, dimana terjadi penurunan hasil produksi padi dari triwulan I sampai dengan triwulan III. Untuk lebih jelas berikut tabel capaian produksi padi pada Tahun 2021 :

⁶ BPS Sumbar, 2020, *Luas Panen Dan Produksi Padi Provinsi Sumatera Barat 2020*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, hlm. 4, diakses pada 3 Februari 2022, pukul 21:09 WIB

Tabel 1. 2 Capaian Kinerja Produksi Padi Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian (%)
	2021	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	s/d Triwulan III
1. Peningkatan produksi tanaman pangan (ton)	390,212.71	102,111.28	88,619.19	85,113.54	-	70.69
a. Padi	284,353.35	82,832.97	72,704.07	71,183.88	-	79.73

Sumber : Data Produksi Padi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Merujuk pada penjabaran data dari Tabel 1.2 diketahui produktivitas padi di Kabupaten Tanah Datar cenderung mengalami penurunan. Bahkan data terbaru produksi padi di Tahun 2021 menunjukkan dari triwulan I sampai dengan triwulan III mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan ini. Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan di atas dikarenakan banyaknya manfaat serta keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan program ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan fokus membahas tentang bagaimana implementasi dari Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini di Kabupaten Tanah Datar.

Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan produktivitas lahan melalui peningkatan produksi per Masa Tanam (MT) dan peningkatan Indeks Panen (IP) per tahun. Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten pertama pelaksana pengembang teknologi padi salibu di Sumatra Barat. Penemuan teknik padi salibu ini berawal dari hasil ketidaksengajaan seorang petani yang ada di Nagari Tabek yaitu Emiwati. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Yulfiardi menyampaikan bagaimana awal mula ditemukannya teknik salibu di Tanah Datar sebagai berikut : “ Bermula pada Tahun 2008 terjadi serangan hama tikus yang cukup parah pada hamparan tanaman padi Kelompok Tani Wanita (KWT) Flamboyan, Emiwati (Ketua KWT) mencoba membersihkan dengan jalan memotong tunggul padi setinggi 2 (dua) cm kemudian dilakukan pemupukan. Hasilnya cukup bagus dan cara ini mulai dicoba bersama anggota KWT Flamboyan hingga 3 (tiga) kali panen dengan hasil yang maksimal. Kemudian dilakukan pembinaan dan pendampingan hingga akhirnya ditemukanlah teknologi padi salibu ini” tuturnya⁷. Dari penemuan tersebutlah lahir teknik padi salibu yang kemudian teknik ini diterapkan hingga sekarang karena melihat keuntungan yang didapatkan bagi para petani.

Salibu sendiri merupakan kepanjangan dari kata “salin ibu”, yang mana maksudnya disini adalah mengganti induk tanaman padi dengan menggunakan

⁷ Tabloidsinartani.com, 2021, “Tingkatkan Produksi, Budidaya Padi Salibu Lebih Hemat”, diakses dari <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/pangan/18092-Tingkatkan-Produksi-Budidaya-Padi-Salibu-Lebih-Hemat> pada pukul 23:32 WIB

rumpun padi sisa panen. Teknologi padi salibu merupakan suatu bentuk modifikasi pada tanaman ratun yang mana tunggul setelah panen tanaman utama yang tingginya sekitar 25 cm, dipelihara selama 7-10 hari atau dibiarkan hingga muncul tunas baru. Pelaksanaan modifikasi ini tidak disarankan jika tunas yang keluar kurang dari 70%. Jika tumbuh lebih dari 70% maka lakukanlah pemotongan kembali secara seragam hingga ketinggian 3-5 cm, kemudian dipelihara dengan baik hingga panen. Berikut ini salah satu bentuk contoh dari pelaksanaan dari teknologi padi salibu :

Gambar 1. 1 Pemberian Pupuk pada Tunas Padi yang Baru Selesai di Potong



Sumber : Data Sekunder Dinas Pertanian

Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar sendiri pertama kali mulai dijalankan sejak Tahun 2013 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar sampai saat sekarang ini. Seperti yang diungkapkan oleh Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar berikut ini:

“....Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Pada Tahun 2013 ini teknologi padi salibu masih dalam tahap pengujian apakah pembudidayaan dengan menggunakan teknik salibu ini dapat membantu mempercepat proses produksi padi atau tidak. Baru pada Tahun 2014 disediakan anggaran tersendiri untuk pelaksanaan Program

Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini”. (Hasil wawancara awal dengan Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 19 Oktober 2021, pukul 14.00-15.00 WIB)

Merujuk pada wawancara di atas dapat diketahui bahwa Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini dilaksanakan pada Tahun 2013 dalam bentuk uji coba kelayakan teknologi padi salibu. Karena melihat peluang keuntungan yang besar dengan pelaksanaan teknologi padi salibu ini, maka akhirnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2014 barulah melakukan penerapan teknologi salibu ini secara resmi. Untuk mendukung pengembangan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan berupa alat mesin pemotong rumput dan sarana pendukung lainnya yang dianggarkan dari dana APBD kepada para kelompok tani pengembang padi salibu.

Untuk lokasi yang menjadi tempat pertama kali pelaksanaan teknologi padi salibu ini adalah di Nagari Tabek Kecamatan Pariangan. Nagari Tabek atau yang dijuluki sebagai “Kampung Salibu” ini merupakan nagari dengan pelaksanaan salibu terbanyak di Kabupaten Tanah Datar. Berikut ini data historis terkait pengembangan lahan dan hasil produksi teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar :

Tabel 1. 3 Luas Pengembangan dan Produksi Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	2017		2018		2019		2020		2021	
		LUA S (HA)	PRODU KSI (TON)	LU AS (HA)	PRODU KSI (TON)						
1	X Koto	30,0	174,0	31,0	180,7	5,0	29,2	0,5	2,865	-	0
2	Batipuh	36,2	211,8	37,0	216,8	2,0	11,7	0,3	1,749	5,0	24,8
3	Batipuh Selatan	102,0	652,8	108,0	680,4	20,0	126,0	5,0	30	4,4	15
4	Pariangan	900,0	6750,0	960,0	7296,0	900,0	6561,0	900,0	6570	55,0	233,6
5	Rambatan	90,0	585,0	95,0	579,5	20,0	122,0	1,0	5,8	-	0
6	Lima Kaum	93,0	604,5	98,0	646,8	50,0	315,5	7,0	42,7	5	0
7	Tanjung Emas	10,0	58,0	9,0	52,2	-	-	0	0	0,25	0
8	Padang Ganting	10,0	56,0	10,0	57,0	1,0	5,6	0,5	2,8	0,0	0
9	Lintau Buo	30,0	171,0	32,0	185,6	10,0	57,0	3	17,1	3	17,7
10	Lintau Buo Utara	50,0	290,0	50,0	295,0	5,0	29,0	0,5	2,85	0,0	0
11	Sungayang	20,0	120,0	21,0	126,0	5,0	29,5	0,3	1,755	0,0	0
12	Sungai Tarab	130,0	897,0	150,0	1050,0	160,0	1120,0	170,0	1173	1	6,9
13	Salimpaung	30,0	198,0	32,0	208,0	5,0	29,5	0,3	1,68	1,0	0
14	Tanjung Baru	40,0	240,0	20,0	120,0	17,0	98,6	0,5	2,75	0,0	0
TANAH DATAR		1.571,20	11008,1	1653,0	11694,0	1200,0	8534,6	1088,9	7855,0	74,7	298,0

Sumber : Rekap Data Perkembangan Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar

Data di atas memperlihatkan pengembangan luas teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2017-2021. Berdasarkan data dari Tabel 1.3 di atas dapat dilihat lokasi dengan pengembangan paling luas berada di Kecamatan Pariangan. Pengembangan terbesar terjadi pada Tahun 2018 di Kecamatan Pariangan dengan luas daerah pengembangannya mencapai 960 hektare dengan hasil yang diperoleh mencapai 7296 ton hasil padi atau 58% dari total keseluruhan data produksi padi salibu pada tahun 2018 yang lalu. Sedangkan luas pengembangan lahan

teknologi padi salibu yang paling kecil terjadi pada Tahun 2021 dimana hanya 74,7 hektare saja untuk total luas keseluruhan daerah pengembangan padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Sejak awal diterapkannya program ini hingga sekarang, pelaksanaannya telah menyebar di 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu :

1. Kecamatan Sungai Tarab
2. Kecamatan X Koto
3. Kecamatan Batipuh
4. Kecamatan Batipuh Selatan
5. Kecamatan Pariangan
6. Kecamatan Rambatan
7. Kecamatan Tanjung Baru
8. Kecamatan Sungayang
9. Kecamatan Lima Kaum
10. Kecamatan Lintau Buo
11. Kecamatan Lintau Buo Utara
12. Kecamatan Padang Ganting
13. Kecamatan Tanjung Emas
14. Kecamatan Salimpaung



Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar berikut ini :

“...untuk pelaksanaan teknologi padi salibu ini sudah pernah dicoba di ke 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Namun, dalam pelaksanaannya ini terjadi fluktuasi yang mana terjadi kenaikan dan penurunan dalam penerapan teknologi padi salibu. Untuk daerah dengan pelaksanaan terluas terdapat di Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Lintau Buo.”(Hasil wawancara awal dengan Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 19 Oktober 2021, pukul 14.00-15.00 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui pengembangan teknologi padi salibu ini telah menyebar di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sejak awal mula pelaksanaan pada Tahun 2013 hingga sekarang Dinas Pertanian terus berusaha meningkatkan baik itu untuk pengembangan lahan untuk pelaksanaan teknologi padi salibu maupun pengoptimalan peningkatan hasil produksi yang didapatkan.

Untuk menunjang pelaksanaan dari Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar sendiri, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar rutin melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Sekolah Lapang (SL) Padi Salibu. Sekolah Lapang (SL) Padi Salibu ini merupakan suatu bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar yang dalam hal ini dilakukan langsung oleh penyuluh yang ada di BPP kepada para kelompok tani pelaksana yang ada disetiap kecamatan tersebut. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar terkait Sekolah Lapang (SL) Padi Salibu :

“...untuk pengembangan teknologi padi salibu ini sendiri ada kegiatan penunjangnya yang disebut dengan sekolah lapang (SL) padi salibu. Sekolah lapang padi salibu ini merupakan suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) kepada para petani. Disini penyuluh yang terjun langsung adalah penyuluh yang ada di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan sekolah lapang padi salibu ini sendiri kami lakukan 4x dalam sebulan. Dalam pelaksanaannya kami akan memberikan beberapa penunjang berupa uang transport setiap kali pelaksanaan SL padi salibu, memberikan ATK (alat tulis kantor) untuk kelancaran SL ini, dan dinas pun juga memberikan bantuan berupa pupuk jenis Urea dan Ponska sebesar 100 kg untuk setiap 1 hektare luas sawah pengembangan padi salibu.”. (Hasil wawancara awal dengan Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 19 Oktober 2021, pukul 14.00-15.00 WIB)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar, ada kegiatan yang disebut dengan Sekolah Lapang (SL) Padi Salibu. Untuk pelaksana kegiatan SL Padi Salibu ini sendiri dibantu oleh para penyuluh yang ada di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada disetiap kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Penyuluh yang ada di BPP tersebut masih termasuk ke dalam bagian Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

BPP sendiri masih merupakan bagian yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pada Dinas Pertanian dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa BPP Kecamatan berbentuk

Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator⁸. Koordinator ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Oleh karena itulah BPP ini masih termasuk ke dalam bagian dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dimana dalam hal ini tergolong ke dalam kelompok jabatan fungsional dinas. Terkait BPP ini berikut penjelasan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar :

“ Kalau Balai Penyuluh Pertanian (BPP) itu di dalam renstra dia berada dibawah kadis. Tapi kalau untuk koordinasi pekerjaannya itu dibawah bidang penyuluhan.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 25 April 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa balai penyuluh pertanian (BPP) ini masih termasuk ke dalam struktur Dinas Pertanian, yaitu kelompok jabatan fungsional. Namun terkait koordinasi pekerjaan itu dibawah bidang penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

Penerapan teknologi padi salibu dalam proses masa tanam memberikan beberapa keuntungan bagi petani diantaranya :

1. Memberikan keuntungan ekonomis berupa penghematan biaya produksi penanaman padi.

Secara ekonomis teknik padi salibu ini dapat menghemat biaya sampai 60% untuk pekerjaan persiapan lahan dan menanam. Dari segi biaya produksi, 1 (satu) hektare luas penanaman padi biasanya menghabiskan biaya sekitar Rp.

⁸ Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2018

8.870.000/hektare, sedangkan penanaman padi menggunakan teknik salibu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 6.310.000/hektare, sehingga petani dapat menghemat pengeluaran biaya produksi sebesar Rp. 2.520.000/hektare. Berdasarkan hitungan hasil rata-rata terendah produksi, biasanya dari segi hasil dalam 1 hektare sawah dapat menghasilkan 6.200 Kg, sedangkan dengan teknologi salibu akan menghasilkan 7.200 Kg/hektare, sehingga keuntungan keseluruhan bagi petani meningkat Rp. 4.560.000,-/1x panen.

Secara lebih rinci dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian⁹, menjelaskan padi salibu dapat memberikan keuntungan penekanan biaya produksi sampai 45% dibandingkan dengan tanam pindah (tapin). Hasil analisis, biaya salibu Rp 1.800.000, sedangkan tapin Rp 3.450.000. Biaya salibu lebih sedikit karena tidak perlu mengeluarkan biaya pembajakan tanah, persemaian serta upah menanam. Saprodi budidaya padi salibu Rp 1.010.000,0 hampir sama dengan budidaya tapin Rp 1.090.000,0, sedangkan biaya panen akan ditentukan dari tingkat produksi berkisar 15-20% dari hasil. Dilihat dari keuntungan budidaya padi salibu (Rp.22.790.000,0) lebih menguntungkan sekitar Rp 5.430.000,0/ha dibandingkan dengan sistem tapin (Rp 17.360.000,0).

⁹ Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), 2015, "Panduan Teknologi Budidaya Padi Salibu", Jakarta : Kementerian Pertanian. Hlm 14-15

Tabel 1. 4 Analisa usaha tani teknologi padi salibu dibandingkan tanam pindah (tapin) (studi kasus Sumatra Barat)

No	Uraian	Jumlah	
		Salibu	Tapin
A	Biaya Upah		
1	Membajak (2x)	-	1.400.000
2	Menggaru (1)	-	300.000
3	Pesemaian	-	150.000
4	Mencabut bibit dan tanam	-	800.000
5	Memotong batang padi sisa panen	600.000	-
6	Penjarangan, penyisipan dan membenam jerami sisa potongan	-	-
7	Menyiang	800.000	600.000
8	Memupuk	200.000	200.000
	Jumlah biaya upah	1.800.000	3.450.000
1	Benih	-	300.000
2	Pupuk UREA	360.000	240.000
3	Pupuk Phonska	450.000	450.000
4	Pestisida	200.000	200.000
B	<i>Biaya Saprodi</i>	1.010.000	1.190.000
C	<i>Biaya Panen (20% hasil)</i>	6.400.000	5.500.000
I	Total Pengeluaran (A+B+C)	9.210.000	10.140.000
II	Penerimaan		
	Hasil Tapin (5,5t/ha) X Rp 5.000,0		27.500.000
	Hasil Salibu (6,4t/ha) x Rp 5.000,0	32.000.000	
III	Keuntungan Bersih	22.790.000	17.360.000
IV	Analisa Usahatani		
	BEP Harga (Rp/kg)	1.440	1.844
	BEP Produksi (kg)	1.842	2.028
	ROI (return on invesment) (%)	274	171
	R/C(revenue cost ratio)	3,47	2,71

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian 2015

2. Dapat membantu meningkatkan hasil produktivitas padi

Teknologi padi salibu ini dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan meningkatkan indeks panen dari 2 (dua) menjadi 3 (tiga) bahkan 4 (empat) kali dalam setahun. Hal ini dikarenakan umur padi yang relatif pendek. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Wanita Flamboyan yang ada di Nagari Tabek yang mengatakan :

“...pelaksanaan tanam padi dengan menggunakan teknik padi salibu ini memang terbukti memberikan keuntungan terjadinya kenaikan indeks produktivitas padi. Hal itu saya rasa sendiri, dimana saya dan anggota kelompok tani saya telah konsisten melaksanakan budidaya padi salibu ini. Pada Tahun 2013 yang lalu kelompok tani Flamboyan kami merupakan kelompok tani pertama yang melaksanakan padi salibu dan didapatkan hasil panen hingga mencapai 3 kali secara maksimal. Sampai sekarang pun saya masih melaksanakan tanam padi dengan menggunakan cara pengelolaan padi salibu ini dan hasil yang didapatkan terkadang meningkat dan terkadang hasilnya sama dengan panen sebelumnya. Untuk penurunan hasil produksi padi ketika menggunakan teknik ini tentu saja pernah saya alami, namun hal itu tidak menjadi permasalahan karna hasil yang saya dapatkan masih memberikan keuntungan dari segi penghematan biaya produksi dari awal tanam hingga panen”. (Hasil wawancara awal dengan Ketua Kelompok Tani Wanita Flamboyan Nagari Tabek pada hari Jum’at 26 November 2021 pukul 09:47 WIB)

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan ketua kelompok tani wanita Flamboyan di Nagari Tabek, dapat dilihat bahwa dengan pelaksanaan teknologi padi salibu ketika memasuki masa tanam padi dapat memberikan keuntungan berupa peningkatan indeks panen dan produktivitas padi serta penghematan biaya upah tanam.

3. Penerapan teknologi padi salibu dapat membantu mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada saat memasuki masa tanam.

Hal ini dikarenakan petani tidak memerlukan penanaman ulang benih padi, karena dengan penggunaan teknologi padi salibu ini petani hanya perlu merawat tunggul ratun sisa pemotongan sebelumnya. Hal ini telah memberikan keuntungan yaitu menghemat biaya upah penanaman dan upah bajak sawah. Ini sangatlah membantu petani apalagi dimasa Covid-19 ini dimana banyak perekonomian keluarga yang terdampak akibat pandemi ini. Hal ini dipertegas dengan pendapat yang disampaikan oleh salah seorang penyuluh yang ada di Kecamatan Pariangan yaitu Widya Erja Syafitri yang mengatakan : “Keunggulan teknologi padi salibu ini adalah tidak membutuhkan olah tanah kembali. Teknologi ini sangat berguna bagi daerah yang kekurangan jumlah tenaga kerja, karena sampai panen tiga kali (IP3) tidak membutuhkan pengelolaan tanah”¹⁰.

4. Penerapan teknologi padi salibu ini dapat menekan kebiasaan petani untuk membakar jerami setelah panen.

Jerami yang sebelumnya tidak dibakar memberikan peluang besar pengembalian bahan organik yang ada. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang penyuluh di Kecamatan Pariangan yaitu Widya Erja Syafitri yang mengatakan bahwa

¹⁰ Republika.co.id, 2020, *Padi Salibu, Teknologi Tanpa Olah Tanah di Sumbar*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qbqn1x349/padi-salibu-teknologi-tanpa-olah-tanah-di-sumbar> pada Sabtu, 2 April 2022 pukul 23:24 WIB

“Salibu adalah teknik sederhana yang dimodifikasi dari kebiasaan petani Nagari Tabek. Jerami tidak dibakar sehingga peluang pengembalian bahan organik lebih besar, terutama dari sisa potongan batang setelah panen” tuturnya melalui pernyataan tertulis yang dihimpun Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhan BPPSDMP)¹¹.

Itulah beberapa keuntungan yang didapatkan dengan pelaksanaan teknologi padi salibu bagi para petani. Teknologi padi salibu akan menghasilkan hasil tahunan yang lebih tinggi jika diterapkan pada pola tanam (Tapin-Salibu1-Salibu2) dibandingkan dengan pola tanam (Tapin1-Tapin2). Pola tanam (Tapin-Salibu1-Salibu2) ini memiliki potensi hasil sekitar 18 ton/tahun, sedangkan pola tanam (Tapin-Tapin) hanya mampu menghasilkan sekitar 11 ton/tahun. Berikut ini analisa perbandingan keuntungan menggunakan pola (tapin-salibu1-salibu2) dengan pola (tapin-tapin):

Tabel 1. 5 Analisa usaha tani padi (Tapin-Salibu-Salibu) dibandingkan (Tapin-Tapin)/tahun

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Tapin+Salibu+Salibu	Tapin+Tapin
A	Biaya Upah	7.050.000	6.900.000
B	Biaya Saprodi	3.210.000	2.380.000
C	Biaya Panen (20% hasil)	18.000.000	11.000.000
I	Total Pengeluaran (A+B+C)	28.260.000	20.280.000
II	Penerimaan		
	Hasil Ta-pin (11t/ha GKP)x Rp 5.000		55.000.000
	Hasil Salibu (18,3t/ha GKP)x Rp	91.500.000	

¹¹ Ibid

	5.000		
III	Keuntungan Bersih	63.240.000	34.720.000

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian 2015

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas dapat dilihat besarnya keuntungan yang bisa didapatkan petani ketika menerapkan teknologi padi salibu pada masa tanam. Melihat keberhasilan dari penerapan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil yang didapatkan, ada beberapa kabupaten yang melakukan studi banding untuk melihat keberhasilan penerapan teknologi padi salibu ini dan menerapkannya di kabupaten lain, seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok. Namun, sentra pengembangan teknologi padi salibu ini masih terfokus di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut :

“...Sejak awal diterapkannya teknologi padi salibu ini kita telah melihat manfaat yang didapatkan dari penerapan teknologi ini. Penerapan teknik padi salibu ini benar-benar memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi petani, seperti penghematan biaya produksi. Berangkat dari hal tersebut, dinas pertanian gencar melakukan promosi pengenalan teknologi padi salibu ini. Bahkan pada Tahun 2016 yang lalu teknologi padi salibu yang dikembangkan Kabupaten Tanah Datar ini mendapatkan perhatian dari Menteri Pertanian RI yaitu, DR. Ir. H. Andi Amran Sulaiman yang secara langsung mengunjungi Nagari Tabek Kecamatan Pariangan dalam rangka melihat langsung keunggulan serta manfaat dari teknologi padi salibu yang telah dikembangkan oleh Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun yang lalu. Selain itu banyak juga kabupaten lain yang melakukan studi banding melihat manfaat teknik padi salibu ini dan mencoba menerapkannya di kabupaten mereka masing-masing. Sampai sekarang sudah ada beberapa kabupaten yang telah menerapkan teknik padi salibu ini.

(Hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Madya Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Senin 19 Oktober 2021, pukul 10:15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Kabupaten Tanah Datar masih menjadi sentra pengembangan budidaya padi salibu di Sumatra Barat dikarenakan pengembangannya masih tetap berjalan dibandingkan dengan kabupaten lain yang sulit menjaga konsistensi pelaksanaan dari teknologi padi salibu ini.

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pegawai di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terkait pelaksanaan salibu di daerah tersebut, sebagai berikut :

“ Kalau untuk data khusus produksi dari pelaksanaan salibu itu tidak ada disini, karena setahu saya jarang petani disini yang melaksanakan salibu. Kalau salibu ini kan banyak dilaksanakannya di Kabupaten Tanah Datar. Kalau disini itu dulu ketika teknologi ini baru temukan memang ada disini dilakukan pelaksanaannya. Tapi kalau untuk sekarang itu jarang bahkan tidak ada yang melaksanakan. Jika pun ada itu data produksi padinya kita satukan dengan data produksi padi secara umum. (Wawancara dengan pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, pada tanggal 12 Oktober 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan salibu di Kota Padang Panjang saat sekarang sudah jarang dilakukan oleh petani disana. Untuk data produksinya pun jika ada itu disatukan dengan data produksi secara umum. Hal senada juga disampaikan oleh pegawai yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Agam, sebagai berikut :

“ untuk yang melaksanakan salibu di sini itu tidak banyak, hanya ada satu atau dua orang petani yang melakukan salibu berdasarkan inisiatif mereka sendiri karena kan ini tidak termasuk ke dalam agenda program dinas. Kemaren itu ada petani di Jorong Pauh, Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur yang melaksanakan salibu.

Itu kami ketahui ketika melakukan tugas lapangan disana. Hasil salibu yang didapatkan itu cukup besar sekitar 6,5 ton/ha. Namun, kalau untuk data khusus yang mengelompokkan hasil padi dengan menggunakan teknik salibu itu tidak ada di dinas, karena datanya itu disatukan semuanya ke dalam data produksi padi secara umum.”(Hasil wawancara dengan penyuluh yang ada di Kecamatan Matur, pada tanggal 23 September 2022)

Merujuk kepada pernyataan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa untuk kabupaten/kota lain pelaksanaan teknologi padi salibu ini tidak menjadi prioritas bagi mereka, jika ada petani yang ingin melaksanakan salibu maka mereka dapat melaksanakannya tetapi tidak difasilitasi oleh dinas karena kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam agenda yang dianggarkan oleh dinas terkait.

Berdasarkan kedua kutipan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pelaksanaan salibu di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam sudah jarang ditemukan serta dilaksanakan dan pengembangan salibu ini tidak termasuk kegiatan yang di anggarkan oleh dinas pertanian disana sehingga pusat pengembangan salibu masih terletak di Kabupaten Tanah Datar.

Penerapan teknologi padi salibu secara merata di Kabupaten Tanah Datar dapat menjawab permasalahan terkait semakin menurunnya produksi padi baik itu diakibatkan oleh berkurangnya lahan pertanian, belum optimalnya upaya diversifikasi, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, belum semua petani mau menerapkan Teknologi Padi Salibu ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Pola prilaku dan sikap petani yang sulit diubah agar tertib melakukan teknologi padi salibu.

2. Masih adanya sistem kepemilikan lahan yang menggunakan sistem bagi hasil karena menggunakan tanah milik adat dan sistem sewa, sehingga petani tidak dapat mengolah usaha tani sesuai dengan keinginan mereka
3. Adanya tradisi-tradisi sosial masyarakat setempat yang berdampak pada sulitnya menerapkan salibu di daerah tersebut, seperti tradisi *bakauah* yang terdapat di Kecamatan Tanjung Emas

Selain itu, merujuk pada Tabel 1.3 di atas tentang luas pengembangan dan produksi teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2017-2021, menunjukkan terjadinya penurunan drastis terkait luas daerah pengembangan teknologi padi salibu pada Tahun 2020 dan 2021 diakibatkan oleh covid-19. Penurunan paling drastis terjadi pada Tahun 2021 dengan hanya 74,7 hektare saja untuk total luas pengembangan teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan dana untuk pengembangan teknologi ini dipotong dan dialihkan untuk hal yang lebih strategis sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah lahan.

Ditambah lagi data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar menunjukkan terkait jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan terkait sekolah lapang (SL) padi salibu ini dari Tahun 2018 sampai 2021 juga mengalami penurunan, berikut data tersebut :

Tabel 1. 6 Kelompok tani yang mendapatkan pelatihan sekolah lapang (SL) Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar

Kecamatan	Tahun				Jumlah Klp Tani
	2018	2019	2020	2021	
Sungai Tarab	12	8	1	9	25
X Koto	2	1	-	1	4
Batipuh	2	-	-	2	5
Batipuh Selatan	12	3	-	3	17
Pariangan	12	9	6	12	37
Rambatan	6	2	-	-	9
Lima Kaum	12	6	-	7	25
Tanjung Emas	2	-	-	-	2
Padang Ganting	2	-	-	-	2
Lintau Buo	3	1	-	4	7
Lintau Buo Utara	3	1	-	-	4
Sungayang	4	1	-	-	5
Salimpaung	4	-	-	-	4
Tanjung Baru	4	2	-	3	11
Total Jumlah Per Tahun	80	34	7	41	157

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Tabel 1.6 di atas, menunjukkan bahwa dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021 jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan Sekolah Lapang (SL) Padi Salibu cenderung menurun. Berdasarkan data di atas dapat dilihat kecamatan dengan total kelompok tani yang paling banyak mendapatkan pelatihan sekolah lapang dari Tahun 2018-2021 masih saja terfokus di Kecamatan Pariangan dengan total 37 kelompok tani. Sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Tanjung Emas dan Padang Ganting dengan total kelompok tani hanya 2 kelompok tani saja.

Pada Tahun 2020 juga terjadi pengurangan jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan dimana hanya 7 (tujuh) kelompok tani saja yang mendapatkan pelatihan sekolah lapang (SL) padi salibu. Jumlah ini merupakan jumlah paling sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dana pengembangan teknologi padi salibu dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf bidang tanaman pangan Dinas Pertanian yang mana beliau mengatakan:

“...untuk pelaksanaan sekolah lapang (SL) serta bantuan untuk kelompok tani dalam upaya pelaksanaan pengembangan budidaya padi salibu di Tahun 2020 kemaren sangat minim. Hanya 7 kelompok tani saja yang mendapatkan bantuan serta pelatihan terkait budidaya padi salibu ini. Hal ini dikarenakan terjadinya *recofusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Sebenarnya banyak petani yang mengusulkan waktu itu untuk mengikuti SL Padi Salibu ini. Namun karna adanya pemotongan dana akibat Covid-19 akhirnya hanya 7 kelompok tani saja yang bisa mendapatkan pelatihan serta menerima bantuan untuk pengembangan padi salibu ini.” (Hasil wawancara dengan Staf Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 14:00-15:00 WIB)

Selain itu faktor lain yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Teknologi padi salibu di Kabupaten Tanah Datar adalah kurangnya sumber daya manusia dan non-manusia. Untuk sumber daya non-manusia yang menjadi penghambat pelaksanaan program ini adalah keterbatasan prasarana terutama irigasi. Keberhasilan pelaksanaan dari Budidaya Padi Salibu ini sangatlah bergantung kepada sistem pengairannya. Padi yang tumbuh dengan menggunakan teknik salibu ini sangatlah membutuhkan banyak air untuk keberhasilan penanamannya.

Pelaksanaan program ini juga terkendala dalam hal jumlah sumber daya pelaksanaannya yaitu penyuluh terampil dilapangan. Luasnya wilayah kerja penyuluh yang melebihi kapasitas dapat mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyuluh. Berdasarkan data Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) per Oktober 2018, Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 kecamatan yang terdiri atas 75 desa, yang mana dalam daerah tersebut tersebar penyuluh PNS sebanyak 48 orang, THL-TBPP 40 orang, dan penyuluh swadaya 48 orang, dan keseluruhan penyuluh tersebut tersebar pada unit-unit BPP yang mewakili 14 kecamatan tersebut. Berikut ini data BPP/BPK pada masing-masing kecamatan sebagai berikut¹² :

Tabel 1. 7 Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan Kabupaten Tanah Datar

No	Nama BP3K	Nama	Wilayah	Nama	Jumlah Penyuluh		
		Kelembagaan	Kecamatan	Pimpinan	Penyuluh PNS	THL-TBPP	Penyuluh Swadaya
1	BPP Sungai Tarab	Balai Penyuluh Pertanian	Sungai Tarab	Yufrizal, S.Pt	7	3	4
2	Tanjung Emas	BPP	Tanjung Emas	Malyunis	4	1	4
3	BPP Kecamatan Lima Kaum	BPK	Lima Kaum	Rosnidel, S.Pt	5	1	5
4	BPP Batipuh	BPK	Batipuh	Trivera, S.Pt	2	5	8
5	BPK Lintau Buo	BPK	Lintau Buo	Syafrijal, A.Md	4	2	2

¹² Sri Wahyuni & dkk, 2019, *Peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Dalam Penyuluhan Komoditi Pangan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Agriseip Vol.18 No.2, hal.241, diakses dari <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agriseip/article/view/6195>, pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 0:13 WIB)

No	Nama BP3K	Nama	Wilayah	Nama	Jumlah Penyuluh		
		Kelembagaan	Kecamatan	Pimpinan	Penyuluh PNS	THL-TBP	Penyuluh Swadaya
6	BPK Lintau Buo Utara	BPK	Lintau Buo Utara	Effendi	2	6	1
7	Padang Ganting	BPK	Padang Ganting	Rostina, SP	3	2	2
8	BPK Pariangan	BPK	Pariangan	Yeni Marlis, S.Pt	4	3	5
9	BPK Rambatan	BPK	Rambatan	Tunasril, A.Md	4	1	3
10	BPK Salimpaung	BPK	Salimpaung	Erzanedi, S.Pt	1	6	5
11	BPK Sungayang	BPK	Sungayang	Nofriani, N	4	2	2
12	BPK Tanjung Baru	BPK	Tanjung Baru	Marwan, S.Pt	2	2	1
13	BPK X Koto	BPK	Sepuluh Koto	Khairil, SP	2	4	2
14	BPP Batipuh Selatan	BPP	Batipuh Selatan	Virda Yufanto Rajab, S.Pt	3	2	3

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Data Simluhtan Tahun 2018 di atas dapat dilihat bahwa luasnya daerah binaan serta banyaknya kelompok tani di tiap kecamatan berbanding terbalik dengan jumlah penyuluh yang ada di Balai Penyuluh Pertanian yang ada di kecamatan. Berikut ini data terkait rekap jumlah kelompok tani per wilayah di Kabupaten Tanah Datar :

Tabel 1. 8 Rekap Kelompok Tani Per Wilayah di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota
1	Batipuh	122	2404	2476
2	Batipuh Selatan	96	1203	1286
3	Lima Kaum	124	1357	1746
4	Lintau Buo	94	2436	1312
5	Lintau Buo Utara	148	4455	1254
6	Padang Ganting	75	2297	1217
7	Pariangan	118	1969	2516
8	Rambatan	163	3276	3522
9	Salimpaung	145	1950	1704
10	Sepuluh Koto	184	4413	1863
11	Sungai Tarap	152	3738	2354
12	Sungayang	79	2188	2351
13	Tanjung Baru	108	1951	1481
14	Tanjung Emas	119	3225	2058
	Jumlah	1727	36.862	27.140

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan perbandingan dua tabel di atas terkait jumlah penyuluh di BPP Kecamatan dengan jumlah kelompok tani yang ada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar itu berbanding terbalik. Tabel 1.7 menunjukkan tenaga penyuluh yang mendampingi petani di setiap kecamatan masih sedikit, yaitu satu

orang penyuluh mengampuh tiga sampai empat nagari. Tidak idealnya antara jumlah penyuluh dengan nagari binaan ini juga ditekankan oleh salah seorang penyuluh di Kecamatan Sungai Tarab, Dona Dafila yang mengatakan : “Terjadinya *overload* tanggung jawab penyuluh terhadap wilayah kerja, seperti satu penyuluh mengelola tiga wilayah nagari. Hal tersebut saya alami sendiri, sehingga saya sangat kewalahan. Oleh karena itu, saya kira sangat perlu penambahan jumlah penyuluh pertanian”¹³. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa salah satu kendala yang menghambat pengimplementasian Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar dengan baik adalah kurangnya sumber daya pelaksana. Sumber daya pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan karna tanpa adanya pelaksana maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah peneliti jabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana Implementasi dari Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar terutama terkait implementasi program pada Tahun 2020 dan 2021.

¹³ Ibid, hlm.241

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengetahui “Bagaimana Implementasi Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis Pengimplementasian Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dari analisisnya untuk kajian ilmu administrasi publik khususnya kebijakan publik yaitu keefektifan pengimplementasian kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar ini bisa menjadi masukan dalam mengoptimalkan pengimplementasian Program Pengembangan Teknologi Padi Salibu.
2. Bagi penulis penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.



3. Bagi petani ini menjadi masukan dalam permasalahan peningkatan produktivitas padi sehingga kedepannya produktivitas padi di Kabupaten Tanah Datar menjadi lebih meningkat kedepannya



